

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan kajian pendidikan yang secara program dilaksanakan pada pendidikan formal. PKn lebih dominan diajarkan di sekolah, karena masih menjadi kajian teoritis di jenjang pendidikan formal. Dalam misi PKn menjadikan warga negara yang baik masih terfokus pada pembentukan karakter peserta didik. Padahal PKn memiliki domain yang sangat luas untuk diajarkan sebagai sebuah disiplin ilmu.

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya membawa misi pendidikan moral, membentuk warga negara cerdas, demokratis, berakhlak mulia, secara konsisten melestarikan dan mengemban cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. PKn memiliki visi untuk mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab, warga negara bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran dan status fungsional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan untuk mengembangkan secara terstruktur untuk membentuk karakter/watak tidak lepas dari struktur kebijakan pembangunan nasional, pembangunan karakter, serta pembangunan bangsa (Akbal, 2016). Pendidikan kewarganegaraan menjadi keilmuan yang memiliki misi membentuk warga negara yang “*smart and good citizen*” berdasar pada misi inilah PKn memiliki amanat besar dalam membangun karakter bangsa.

Misi PKn masih berpusat pada pendidikan formal di persekolahan. PKn masih menjadi sebuah pembahasan teori di jenjang pendidikan formal. Padahal cakupan PKn amatlah luas sebagai sebuah disiplin ilmu. PKn memiliki domain-domain yang dapat membangun karakter terlepas dari pendidikan formal. Pada sektor yang lebih luas lagi PKn telah memainkan perannya pada domain sosio-

kultural yang dapat dijadikan wadah dalam membangun karakter bangsa di masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Winataputra (2012, hal. 211) menyatakan bahwa :

Dalam spektrum yang lebih luas PKn memiliki tiga domain, yakni domain kurikuler (PKn sebagai mata pelajaran di sekolah), domain sosio-kultural (PKn yang berkembang di masyarakat oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya), dan domain kajian ilmiah (kegiatan penelitian dan pengembangan program-program pendidikan kewarganegaraan).

Berdasarkan penjelasan di atas, misi PKn untuk mewujudkan warga negara “*smart and good citizen*” maka PKn tidak hanya terfokus pada ranah pendidikan dipersekolahan. Akan tetapi, PKn juga harus menyentuh ranah kemasyarakatan melalui berbagai program yang berorientasi pada perkembangan watak/karakter. Sebagaimana dikemukakan oleh Budimansyah (2010, hal. 145) menyatakan bahwa :

Untuk membangun karakter bangsa, PKn juga harus memainkan perannya sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal. PKn juga menggunakan perannya dalam membangun gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, organisasi sosial/politik, pendidikan politik kebangsaan. Secara keseluruhan elemen ini harus menjadi satu kesatuan.

PKn memiliki cakupan yang luas dalam membangun dan membentuk karakter/watak bangsa demi mewujudkan warga negara yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Rohani (2015, hal. 231) menyatakan bahwa :

Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan membina warga negara Indonesia agar menjadi warga negara yang memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, pembentukan karakter *community civic* dapat dilakukan melalui LSM, media massa, maupun gerakan-gerakan moral dan gerakan *civil society*.

Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan dapat menghasilkan warganegara yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjadi *a good citizen* (SUTRISNO, 2018). Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civic*) dilakukan melalui sebuah lembaga sosial, organisasi

kemasyarakatan atau gerakan-gerakan moral di masyarakat. Pada aspek kebudayaan *community civic* disampaikan pada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebudayaan. Budaya dan masyarakat pada dasarnya sangat dekat khususnya budaya lokal. Bagi sekelompok masyarakat, budaya lokal telah membentuk identitas masyarakat tersebut. Maka dengan berbasis pada budaya lokal telah menjadi wadah pembentukan karakter dan identitas masyarakat tersebut.

Budaya menjadi elemen penting dalam membentuk jati diri dan identitas bangsa di segala aspek kehidupan. Kekayaan terhadap jenis kebudayaan berpeluang besar dalam membangun peradaban manusia yang berkarakter dan berbudaya. (Kemendikbud, 2019). Budaya lokal dapat menjadi sarana untuk membina dan membentuk karakter bangsa. Dengan mempertahankan budaya lokal juga dapat mempertahankan identitas bangsa. Budaya lokal memiliki peran yang memberikan pengaruh untuk dapat membangun peradaban manusia yang berkarakter (Panjaitan & Sundawa, 2016). Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dengan berbasis pada budaya lokal dapat membentuk karakter untuk cinta terhadap budaya sebagai bentuk identitas.

Budaya lokal pengaruhnya terhadap negara dapat memberikan dampak pada perubahan identitas nasional. Negara juga harus menyediakan perangkat yang memediasi pertemuan antar identitas agar identitas asing tidak langsung masuk dalam kehidupan masyarakat. Perangkat itu berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal melalui pendidikan formal dipersekolahan dan non formal melalui gerakan-gerakan komunitas masyarakat, yang dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai identitas kultural yang khas Indonesia, serta arti penting mempertahankan homogenisasi globalisasi dan regulasi yang melindungi kelestarian identitas nasional (Budiarto, 2020).

Maka budaya lokal memiliki domain untuk menguatkan identitas masyarakat dengan memberikan pengaruh pada identitas nasional. Dengan cara menyikapi isu globalisasi dan revolusi industri dengan melakukan revitalisasi identitas kultural Indonesia melalui pembangunan jati diri bangsa untuk memperkokoh identitas kebangsaan (Mubah, 2011). Mengembangkan budaya

lokal sebagai pembelajaran bagi masyarakat sangat penting. Dikarenakan budaya lokal memiliki nilai-nilai yang mengandung unsur kemasyarakatan. Melalui budaya lokal juga dapat menjadi sarana untuk pembelajaran yang diajar disetiap jenjang pendidikan. Budaya lokal dapat menjadi sarana pembentukan karakter bangsa (Prayogi & Danial, 2016). Pembentukan karakter bangsa dapat diupayakan dengan berbagai cara dengan menginternalisasi nilai yang terkandung di dalam budaya lokal kepada masyarakat

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan yang terjadi masih sangat kurang. Perlu perhatian lebih dalam membina warga masyarakat dalam menangani persoalan lingkungan sosialnya. Keadaan ini ditandai dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, munculnya sikap apatis, individualistis dan konsumtif. Kesadaran warga negara terhadap sesuatu akan muncul seiring dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sebagian orang akan menyadari sesuatu ketika kehilangan hal yang berharga. Maka kesadaran bukan karena paksaan akan tetapi kesadaran muncul dan didorong oleh pengetahuan (Darsono, 2017).

Membangun kesadaran warga masyarakat terhadap permasalahan sosialnya, maka peran Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat (*community civic*) harus dioptimalkan di masyarakat. Tantangan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan di tengah arus globalisasi, revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, membawa dampak positif dan tidak sedikit dampak negatifnya. Untuk itu melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan sebagai perisai untuk tetap melaksanakan kehidupan sosial sesuai dengan norma yang disepakati. Norma-norma itu sesuai dengan Pancasila dan budaya bangsa.

Jika dilihat dari aspek budaya lokal, kesadaran terhadap budaya lokal perlu ditingkatkan. Keberadaannya memiliki proporsi tersendiri bagi masyarakat. Budaya lokal dapat menjadi cerminan identitas dan kepribadian bangsa untuk dilestarikan demi menghindari pengaruh negatif dari budaya asing. Melalui budaya lokal/daerah, masyarakat dapat dibimbing dan diarahkan untuk menjadi

pribadi yang kompeten serta dapat menjiwai identitas bangsa dan cinta terhadap tanah air (Mahardika & Darmawan, 2016).

Tumbuhnya isu-isu globalisasi serta revolusi industri 4.0 mengakibatkan kebudayaan mengalami perubahan. Budaya lokal yang bersifat tradisional perlahan tergantikan dengan adanya kecanggihan teknologi. Didukung oleh teknologi yang dapat mengakses segala jenis informasi dan mengenal budaya lain. Sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat mengadopsi budaya asing dalam lingkungannya. Melihat kenyataan masyarakat Indonesia lebih tertarik pada budaya asing yang lebih praktis dan unik. Budaya nusantara perlahan memudar dikarenakan berkurangnya rasa kepemilikan dari anak-anak muda atas budayanya sendiri (Nahak, 2019). Perkembangan globalisasi dan budaya modern yang dikemas dalam berbagai bentuk dapat mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam melestarikan keberadaan budaya yang bersifat tradisional (Fauzan & Nashar, 2017).

Tantangan yang dihadapi terkait dengan kondisi budaya lokal dalam arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 adalah (1) Kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai dari luar, pada akhirnya berakibat pada perubahan sikap dan perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya lokal; (2) Perubahan sikap berkaitan dengan pergeseran nilai lokal, nilai-nilai nasionalisme juga mengalami penurunan terutama di kalangan masyarakat dan generasi muda; (3) Belum maksimalnya peranaan institusi pendidikan formal maupun non formal dalam usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia (Maftuh, 2008).

Permasalahan terjadi terhadap budaya lokal di masyarakat adalah perilaku-perilaku masyarakat itu sendiri sehingga budaya lokal perlahan memudar. Kurangnya minat dan kesadaran, ketidakpedulian terhadap budaya sendiri, kurang informasi dan pengetahuan, malu dan gengsi terhadap budaya lokal, lebih tertarik pada budaya asing dan pengaruh teknologi menjadi faktor yang membuat budaya lokal luntur. Jika faktor-faktor ini mengalami pembiaran maka akan terjadi dampak negatif terhadap budaya lokal di masyarakat. Dampak

negatif ini berupa: 1. Sikap individualistik; 2. Membawa budaya barat dalam kehidupannya; 3. Terjadinya kesenjangan sosial (Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan budaya lokal menjadi fokus utama yang menarik untuk dilestarikan dan dikembangkan. Partisipasi masyarakat dalam objek pemajuan kebudayaan (OPK) dalam persentase yang melakukan kegiatan olahraga tradisional masih rendah yaitu sebesar 2,46%. Begitupun dengan permainan rakyat hanya memiliki persentase 12,60 %, hal ini dikarenakan permainan rakyat perlahan mulai tergerus perkembangan teknologi yang menawarkan audio dan visual. Kemudian untuk produk tradisional seperti busana daerah, kerajinan tradisional berkisar di angka 40%. Keadaan ini yang dapat mengakibatkan lunturnya budaya daerah.

Jika kondisi tersebut terus-menerus terjadi, maka budaya-budaya Indonesia perlahan hilang. Maka tidak akan menjadi permasalahan jika budaya Indonesia sering diklaim oleh pihak lain. Seperti yang pernah terjadi budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga, Kuda Lumping diklaim menjadi milik negara Malaysia. Hal ini terjadi pada saat negara Malaysia menunjukkan kostum Kuda Lumping pada acara pagelaran Miss Grand Internasional 2017 (CNN, 2017). Tidak hanya itu, ada beberapa budaya asli Indonesia yang kerap diklaim oleh negara tetangga diantaranya: kesenian wayang, lagu rasa sayange, kesenian batik dan baju, tradisi reog ponorogo, alat musik angklung, makanan rendang dan tari pendet serta tari piring. Berdasarkan PikiranRakyat (2020) terkait dengan kondisi seni budaya tradisional yang semakin mengalami keterpurukan. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil pendataan bahwa terdapat 80 jenis budaya daerah berada diambang kepunahan dan terdapat 40 jenis kesenian mengalami kepunahan. Keadaan ini dipicu oleh ketidakpedulian elemen masyarakat dan pemerintah dalam menangani sektor kebudayaan.

Jika sektor budaya dapat ditangani dengan serius maka pelestarian, pemajuan, pengembangan dan penyebarluasan warisan budaya yang kurang dikenal sangat penting. Warga negara akan sadar betapa pentingnya melestarikan warisan budaya. Lebih dari 70% pendapatan finansial dapat diraih dengan

mendayagunakan kebudayaan (Redweik et al., 2017). Karena hal tersebut berpotensi memperluas pengetahuan dan menjadi salah satu alasan utama pelestarian pusaka.

Problematika yang terjadi bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Lebih lanjut pada Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Atas dasar pasal tersebut, pemerintah juga memiliki peran dalam menjalankan upaya memajukan kebudayaan nasional.

Upaya memajukan kebudayaan merupakan amanat konstitusional bagi setiap orang untuk menjalaninya. Hal ini tercantum pada Pasal 28 I ayat (3) bahwa “jati diri budaya harus dihormati selaras dengan tuntutan zaman dan peradaban, begitupun dengan hak masyarakat tradisional”. Kemudian amanat ini dipertegas pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) menegaskan tentang memajukan kebudayaan nasional dengan mengembangkan nilai-nilai budaya. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan semakin mempertegas pentingnya melakukan pelestarian dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, pembangunan dalam bidang sosial telah mencakup pembangunan kebudayaan, kehidupan beragama dan budaya lokal. Pembangunan ini diarahkan agar dapat menciptakan masyarakat yang bermoral, beretika, berakhlak mulia, beradab dan berbudaya sekaligus untuk menciptakan bangsa yang mampu bersaing dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat maupun daerah diwakili SKPD kebudayaan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan sinergitas. Bentuk sinergitas ini berperan memberikan fasilitas kepada organisasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan (Mukhtaromi, 2013). Pemerintah dapat melakukan

upaya pelestarian kebudayaan dengan memperbaiki sistem penataan terhadap situs-situs kebudayaan, memberikan ruang kepada lembaga masyarakat/lembaga adat untuk dapat mengembangkan kebudayaan nasional (Ridwan, 2015).

Mengingat pentingnya budaya lokal dalam lingkup nasional, maka pengembangan dan penguatan nilai-nilai budaya lokal perlu diupayakan dengan cara (1) Pemerintah memberikan fasilitas atau subsidi kepada perkumpulan-perkumpulan yang bergerak pada bidang kebudayaan; (2) *Stakeholders*, dapat melakukan desiminasi melalui media elektronik, media cetak maupun berbagai pertunjukan; (3) Semua pemangku kepentingan giat melakukan gerakan-gerakan moral; (4) Melakukan gerakan revitalisasi dan pembudayaan yang hampir punah atau sudah punah (Ulum & Suharno, 2019). Upaya untuk mengatasi permasalahan budaya lokal dapat dilakukan dengan upaya *preventif*, upaya penanggulangan berupa pemahaman, kesadaran, perilaku masyarakat dalam menjaga dan mengelola budayanya. Usaha ini dapat melibatkan birokrat, masyarakat atau aktivis LSM yang bergerak pada isu-isu kebudayaan. Secara keseluruhan dapat disinergikan dan diarahkan menjadi sistem organisasi yang mengintegrasikan gerakan peduli terhadap budaya lokal.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi pilar demokrasi yang dapat dipahami karena aktivitas-aktivitasnya yang dilakukan oleh LSM mampu membawa rakyat ke arah yang lebih patriotis. Fungsi pendidikan yang dilakukan oleh LSM dapat berupa pemberian informasi, gerakan nyata di masyarakat, maupun partisipasi publik hingga dapat meningkatkan *awareness* rakyat (Rizky, 2018). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran terhadap permasalahan kebudayaan dapat secara langsung memberikan arahan serta mengajak masyarakat untuk terlibat aktif meminimalisir ketidakpedulian terhadap budaya lokal. Berbagai upaya dapat dilakukan dalam penanggulangan masalah kebudayaan melalui penguluhan, pengelolaan maupun dengan mengadakan pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian (Sudiantoro & Ginting, n.d.).

Berdasarkan studi pendahuluan pada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan budaya yaitu yayasan kebudayaan rancage. Yayasan Kebudayaan Rancage memiliki keunikan tersendiri dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Yayasan/Lembaga Masyarakat tersebut dipelopori budayawan Ajip Rosidi dan beberapa orang lainnya pada tahun 1993. Tujuan dari yayasan ini adalah mengembangkan dan membina kehidupan kesusteraan, Seni dan budaya daerah dan nasional. Untuk ketercapaian terhadap tujuannya maka yayasan kebudayaan Rancage melakukan inisiatif untuk memberikan hadiah yaitu pemberian hadiah sastra rancage. pemberian hadiah ini berupa penghargaan ditujukan Untuk orang-orang yang berpengaruh dan berkontribusi pada perkembangan bahasa dan sastra daerah.

Yayasan kebudayaan raancage ini bukan sebuah organisasi atau lembaga yang melakukan pameran kebudayaan ataupun pentas seni. Melainkan lembaga ini bergerak dibidang penelitian dan pengembangan kebudayaan daerah maupun nasional. Karena lembaga ini menganggap masih sedikit pemikir-pemikir yang tertarik untuk konsen melakukan penelitian dan pengembangan budaya lokal untuk memajukannya ke pentas yang lebih luas lagi.

Rancage telah memperkuat akarnya dengan tetap merumuskan pokok-pokok permasalahan kebudayaan. Dalam hal ini rancage telah melakukan 2 (dua) kali konferensi internasional budaya Sunda. Pertama dilakukan pada tahun 2001 dan kedua pada tahun 2011 di gedung Merdeka. Kemudian telah melakukan konferensi bahasa daerah nusantara muslim Indonesia. Saat ini juga rancage masih dalam pengerjaan dua program yaitu pertama, program rutin seperti pemberian hadiah sastra ditujukan kepada sosok yang berpengaruh dan berjasa dalam pengembangan sastra. Kedua, program temporari adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta menyesuaikan keadaan. Saat ini untuk program temporari akan melakukan kegiatan peringatan hari bahasa ibu, melakuka konferensi budaya daerah seluruh Indonesia.

Pada pelaksanaan Konferensi Internasional Budaya Sunda di Bandung, konferensi berlangsung dengan latar belakang kekhawatiran akan budaya Sunda perlahan mulai luntur dikalangan generasi muda. Pada konferensi tersebut telah dibahas berbagai upaya pelestarian dan tumbuh kembangnya budaya lokal Sunda agar tidak ditinggalkan masyarakatnya. Berbagai upaya dilakukan dengan menempuh tiga hal: pertama, revitalisasi budaya; kedua, pemahaman untuk menimbulkan kesadaran; ketiga, perencanaan kolektif dan membangkitkan kreatifitas.

Yayasan kebudayaan Rancage telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kepedulian terhadap budaya lokal. Dikarenakan keutuhan budaya lokal bagi masyarakat perlahan tergantikan. Maka program-program untuk mengembangkan budaya lokal dengan berbagai model dilakukan sebagai bentuk kecintaan akan warisan daerah sendiri. Kecintaan itu harus tumbuh dan berkembang selalu ditengah masyarakat.

Berdasarkan observasi pendahuluan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut di yayasan kebudayaan Rancage. Yayasan ini memiliki kasus tersendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan budaya lokal/daerah. Proses penelitian akan menarik dilakukan secara mendalam mengingat yayasan ini bergerak dibidang penelitian dan pengembangan budaya lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai domain sosiokultural. Sasaran pendidikan kewarganegaraan sebagai domain sosiokultural adalah anggota masyarakat yang terkumpul dalam suatu komunitas. Pemahaman kewarganegaraan harus mengarah pada pendidikan nonformal, karena bentuk ini tidak hanya dilakukan di pendidikan formal. Warga negara tidak hanya bisa belajar di sekolah, tapi juga dapat dilaksanakan dimasyarakat.

Proses penelitian ini akan mengkaji PKn dalam domain pengalaman diluar sekolah. Pembelajaran berbasis budaya lokal menjadi pembelajaran yang didapat dalam unsur PKn. Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat dapat membantu mengeksplorasi lebih jauh pemahaman masyarakat. Pentingnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya

lokal merupakan bagian dari mewujudkan warga negara yang baik. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji mengenai “Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya lokal Di Masyarakat”. Penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi keilmuan Pkn dengan basis budaya lokal dalam perspektif mikro.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah merupakan bentuk spesifik dari uraian latar belakang terjadinya sebuah permasalahan yang akan dicari solusinya. Sebagaimana yang telah di rincikan pada tahap sebelumnya. Maka dari itu, untuk mengkrucutkan latar masalah pada tahap sebelumnya, pada bagian ini akan di rumuskan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk menjadi pemecahan masalah nantinya. adapun beberapa pertanyaantelah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan dalam mengembangkan budaya lokal melalui Yayasan Kebudayaan Rancage ?
2. Mengapa program-program Yayasan Kebudayaan Rancage dapat membina warga masyarakat untuk pengembangan budaya lokal ?
3. Mengapa hasil dari program-program Yayasan Kebudayaan Rancage dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan budaya lokal ?
4. Mengapa masih terdapat hambatan pada pelaksanaan program-program Yayasan Kebudayaan Rancage dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarkatan terhadap pengembangan budaya lokal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 TujuanUmum

Secara umum, studi ini dibuat agar memudahkan untuk memahami maksud dari pelaksanaan studi. Adapun secara umum, studi ini telah disusun sesuai dengan rumusan masalah diatas. Pembentukan karya ilmiah ini bertujuan untuk medeskripsikan, menganalisis, mengeksplorasi dan menganalisis pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya lokal di masyarakat. Penelitian ini

berangkat dari permasalahan mengenai permasalahan yang terjadi pada konteks budaya lokal dan pengembangan serta pemajuannya. Mengingat keberadaan budaya lokal perlahan memudar akibat dari adanya globalisasi dan revolusi industri 4.0, maka perlu kajian lebih dalam untuk melihat urgensi budaya lokal bagi masyarakat. Melalui organisasi kemasyarakatan diharapkan ada sebuah model pengembangan budaya yang dapat menjadi wahana pembentukan karakter sekaligus pengalaman belajar di luar sekolah bagi masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mempersempit tujuan umum yang telah disampaikan diatas, maka secara khusus tujuan dari pembentukan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan dalam mengembangkan budaya lokal melalui Yayasan Kebudayaan Rancage.
2. Untuk mengetahui mengapa program-program Yayasan Kebudayaan Rancage dapat membina warga negara dalam pengembangan budaya lokal.
3. Untuk menganalisis mengapa hasil dari program-program Yayasan Kebudayaan Rancage dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan budaya lokal.
4. Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan mengapa masih terdapat hambatan pada pelaksanaan program-program Yayasan Kebudayaan Rancage dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan terhadap pengembangan budaya lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian haruslah memiliki dampak baik bagi seluruh aspek kehidupan. Suatu karya yang baik adalah berupa hasil dari sesuatu yang berguna untuk banyak kalangan. Adapun kegunaan dari karya ini dilihat dari berbagai segi yaitu:

1.4.1. Segi Teoritis

Manfaat yang diharapkan oleh penulis secara teoritis dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan pemikiran. Untuk mengisi kekosongan serta memperkaya refrensi penelitian dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian dapat menjadi pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap insan dalam memajukan budaya lokal. Sekaligus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosiokulutral yang baik.

Penelitian ini merupakan sebuah cara untuk mendorong para akademisi agar melakukan penelitian-penelitian lebih mendalam pada dimensi sosio-kultural. Penelitian ini juga menjadi upaya untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pengalaman diluar sekolah. Pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya lokal di masyarakat memberikan stimulus dalam memperkaya keilmuan PKn sekaligus memperkokoh pengembangan budaya lokal.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang keilmuan bersifat *multifaset*. Harapan dari penelitian ini menjadi refrensi lain dari penelitian-penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Masyarakat dan penelitian tentang budaya lokal didalamnya terdapat kehidupan kewarganegaraan. Sehingga penelitian ini secara teoritis, dapat menjawab persoalan-persoalan di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

1.4.2 Segi Praktis

Riset ini dapat berkontribusi untuk sumbangsih akademis dari perspektif pendidikan kewarganegaraan terhadap permasalahan pengembangan budaya lokal. Sekaligus memberikan kontribusi kepada pihak Yayasan Kebudayaan Rancage sehingga dapat menjadi refrensi dalam melestarikan kebudayaan sekaligus memberikan pandangan jernih terkait masalah sosial dan budaya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan secara ilmiah mengenai partisipasi warga masyarakat melalui LSM pada bidang budaya. Praktik-praktik pelaksanaan pengembangan budaya lokal dapat menjadi sandaran ilmiah dalam upaya mengembangkan dan memajukan budaya lokal sesuai dengan kebutuhan

zaman. Sekaligus akan menjadi solusi maupun alternatif dalam memecahkan masalah yang terjadi pada persoalan budaya lokal.

1.4.3 Segi Kebijakan

Penelitian ini dimaksudkan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dari aspek ilmiah. Sekaligus masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam memajukan kebudayaan nasional. Penelitian ini juga nantinya dapat menjadi alternatif atau acuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dari pemerintah terkait dengan upaya memajukan budaya lokal.

Melalui penelitian ini diharapkan Pemerintah dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan arah kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang ditentukan haruslah sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi di lingkup masyarakat. Kebudayaan juga termasuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. Maka sudah seharusnya kebijakan pemerintah harus menyentuh ranah ilmiah sebagai dasar dalam membuat sebuah kebijakan. Pembangunan kebudayaan dalam bidang sosial termasuk budaya lokal yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkhlah mulia, bermoral dan beretika.

1.4.4 Segi Isu Dan Aksi Sosial

Penelitian ini akan menjadi alternatif untuk menyikapi isu kebudayaan. Dilihat dari aspek isu dan aksi sosial maka akan didapat manfaatnya untuk menjaga akan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal. Agar dapat menjaga dan menghormati sesama manusia yang berbudaya dengan nilai-nilai PKn. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat untuk memecahkan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat. Penelitian ini juga akan menjadi awal bagi setiap warga negara memiliki komitmen untuk mewujudkan partisipasi dalam bentuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan prinsip demokrasi serta praktik-praktik kewarganegaraan.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis akan menjabarkan penulisan yang merujuk pada ketentuan acuan penulisan karya ilmiah yang termuat di Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019. Bagian ini dibentuk bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kandungan dalam penulisan karya ini. Struktur organisasi tesis ini terdiri dari 5 bab yang secara menyeluruh memiliki kaitan antar Bab satu dan lainnya.

Pada bagian Bab I akan memperkenalkan bagian pendahuluan yang menjadi bagian dalam memperkenalkan tesis. Unsur-unsur dalam bagian pendahuluan sebagai gambaran umum dalam tesis ini meliputi: latar belakang penelitian, yang menjelaskan alasan penulis mengangkat masalah untuk diteliti. Sekaligus memaparkan data dan fakta yang mendukung terkait masalah tersebut; Rumusan masalah penelitian, akan menggambarkan masalah-masalah yang diuraikan menjadi bentuk pertanyaan-pertanyaan peneliti; Tujuan penelitian, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan masalah; Manfaat penelitian, menjelaskan kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini. Manfaat penelitianpun dapat dijabarkan dari berbagai segi; Struktur organisasi penelitian, akan memberikan gambaran terkait isi dari tesis ini.

Bab II, memuat landasan teoritis, menyajikan ulasan teori-teori, analisis konsep-konsep, dalil-dalil dan turunannya serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini akan menjelaskan secara kompleks dasar teori yang berhubungan pada konteks masalah yang diteliti. Bab ini meliputi kajian teoritis, yang diharapkan menjadi acuan untuk menelaah lebih dalam mengenai permasalahan penelitian. Bagian ini juga akan menjadi landasan argumentasi dan urgensi penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan, nantinya akan menunjukkan penelitian terdahulu dan ulasannya.

Pada Bab III, bagian ini berisikan metode penelitian yang menjadi bagian prosedural. Bab ini menjelaskan tentang alur penelitian yang akan dilaksanakan. Bagian ini terdiri dari: pendekatan dan metode penelitian, berupa pendekatan yang digunakan serta metode untuk mencari datanya beserta alasan menggunakan

pendekatan dan metode tersebut; partisipan dan lokasi penelitian; mengumpulkan data; menganalisis data; dan memvalidasi data.

Bab IV merupakan bagian Temuan dan Pembahasan. Bagian ini menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan temuan dari hasil penelitian yang menarik, untuk mengungkapkan makna disetiap kejadian yang terjadi selama penelitian. Sehingga temuan dari hasil penelitian akan mengungkapkan hal yang menarik yang telah diolah sesuai dengan rumusan masalah. Pembahasan temuan penelitian dilaksanakan untuk menjawab dan menganalisis lebih mendalam terkait dengan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.

Pada bab V adalah Simpulan, Impilkasi dan Rekomendasi. Bagian ini terdiri dari simpulan berisikan pernyataan singkat dari hasil penelitian berupa analisis singkat. Simpulan terfokus pada menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian secara singkat. Bagian rekomendasi akan menguraikan saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kebaruaran kajian sesuai dengan hasil temuan penelitian.